

# PEMERINTAH SUSUN CETAK BIRU GSW

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tengah menyusun cetak biru proyek Tanggul Laut Raksasa atau *Giant Sea Wall* senilai Rp1.297 triliun untuk menarik minat investor strategis menggarap megaprojek itu.

Jessica Gabriella & Alifian Asma'iyi  
redaks@bisnis.com

**M**enteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan cetak biru atau *blueprint Giant Sea Wall* (GSW) bertujuan merencanakan konstruksi secara kuat guna mengurangi terjadinya kebocoran anggaran atau inefisiensi.

"Kita benar-benar harus meyakinkan *blueprint*-nya itu rapi benar, kita tak ingin lambat-lambat [dalam merumuskan cetak biru] karena mungkin harus segera," jelasnya dalam agenda Forum Kerja Sama Daerah, Raker Gubernur Mitra Praja Utama 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurutnya, proses konstruksi GSW membutuhkan waktu hingga 20 tahun sehingga pembangunan megaprojek tersebut memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Agus menyebutkan bakal bersinergi antara GSW serta melakukan penanganan banjir dan rob dengan menggunakan pendekatan natural.

Dia menegaskan pembangunan konstruksi GSW akan dipercepat tetapi tidak dilakukan secara tergesa-gesa. "Sekali lagi kecepatan bukan berarti tergesa-gesa yang akhirnya [dikhawatirkan] ada yang tidak efisien atau bahkan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang tak baik ke depan kalau tak terencana dengan integratif," tegasnya.

Selama ini, negara-negara yang sudah punya pengalaman membangun tanggul laut raksasa tetap memperhitungkan studi kelayakan proyek tersebut. Khusus GSW, dia menegaskan proyek akan digarap sesuai pendekatan realistis. "Bisa disimpulkan bahwa yang paling *feasible*, yang paling realistis adalah jika kita menerapkan pendekatan yang integratif dan tidak harus sama semuanya [dibangun tanggul dari Banten-Cresik]," jelasnya.

Bila konstruksi GSW digarap seluruhnya menggunakan konstruksi bangunan tembok, dia menilai bisa membutuhkan biaya yang sangat besar. "Sehingga, tidak layak dari sisi ekonomi untuk direalisasikan sepenuhnya."

Nantinya, Agus menegaskan dinding raksasa tersebut hanya dibangun di beberapa wilayah yang masuk kategori urgen. Untuk sejumlah wilayah lainnya, dia menyatakan menggunakan pendekatan natural seperti membangun mangrove di sekitar area pantai.

Khusus beberapa daerah yang masuk kategori parah abrasinya, Agus menyatakan akan dibangun model GSW.

"Kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi, tapi tidak semua, dan ini juga kita prioritaskan mana yang paling rentan terhadap ancaman banjir," paparnya.

Untuk itu, Agus mengungkapkan Kemenko Bidang IPK akan menerapkan pendekatan yang tak seragam di sejumlah wilayah yang masuk proyek GSW.

Menurutnya, pendekatan pembangunan tanggul laut raksasa harus mempertimbangkan karakteristik tiap daerah serta tingkat kerentanannya terhadap banjir.

"Itu memang bisa disimpulkan bahwa yang paling *visible*, yang paling realistis adalah jika kita menerapkan pendekatan yang integratif," ujarnya.

Dia menjelaskan kesimpulan itu diambil berdasarkan berbagai studi yang dilakukan pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan, akademisi, hingga negara yang telah memiliki pengalaman membangun proyek serupa.

Agus memprediksi pembangunan proyek GSW termasuk jangka panjang karena memakan waktu 10 tahun hingga 20 tahun untuk melindungi wilayah utara Pulau Jawa.

"Di situlah kita benar-benar harus meyakinkan *blueprint*-nya itu rapi benar. Kita tidak ingin lambat-lambat karena kita harus segera membangun ini karena jangka Panjang," tegasnya.

Saat ini, sejumlah investor dari beberapa negara telah menyatakan minatnya terlibat dalam proyek GSW. Beberapa pernyataan minat telah disampaikan oleh beberapa investor dari berbagai negara mulai kawasan Asia hingga Eropa.

"Dari China, misalnya, Korea Selatan, kemudian ada Jepang. Selain itu, ada juga dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya," katanya.

Khusus untuk Belanda, Agus menyebutkan telah melakukan studi kelayakan proyek itu pada 2020. Dia menuturkan pemerintah kini menindaklanjuti hasil studi tersebut dengan melakukan dialog bersama dengan Belanda.

Dia menambahkan tindak lanjut tersebut mencakup pembaruan kajian kelayakan, diskusi teknis hingga rencana bantuan teknologi yang akan diberikan.

Agus melanjutkan Belanda memiliki tantangan geografis yang serupa dengan Indonesia sehingga membuat Negeri Kincir Angin itu terus berinovasi terkait teknologi tanggul laut raksasa.

"Kami akan terus membuka komunikasi dan kerjasama

yang saling menguntungkan. Kami juga menjembatannya dengan *project facilitation office*, melalui itu nanti kami akan mendengarkan masukan-masukan dari pihak Belanda dan juga sebaliknya," jelasnya.

Dia melanjutkan pemerintah terus mendorong skema pembiayaan kreatif dalam proyek GSW mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk merampungkan proyek itu.

"Mengingat panjangnya pantai utara Jawa itu sekitar 500 kilometer, dari perhitungan awal kita untuk Jakarta saja itu sekitar US\$8 miliar atau sekitar Rp120 triliun, sementara [biaya proyek] keseluruhan itu bisa mencapai US\$80 miliar," kata Agus.

## ATASI ROB

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan proyek GSW yang membangun di sepanjang pantai utara Pulau Jawa sudah masuk proyek prioritas sesuai instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, proyek itu menjadi salah satu infrastruktur paling vital guna melindungi kawasan pantura dari ancaman rob dan perubahan iklim.

"Mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," jelasnya dalam keterangan resmi.

Dody menambahkan perhatian Presiden terhadap penanganan rob Pantura Jawa terbukti cukup besar. Bahkan, proyek itu dicanangkan dalam visi dan misi Presiden Prabowo sebelum terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

Saat ini, pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai upaya melindungi wilayah pesisir Pantai Utara Jawa terutama wilayah Semarang dan Demak.

"Pembentukan Badan Otorita penting agar pembangunan *Giant Sea Wall* di Pantura bisa terlaksana secara berkelanjutan."

Dalam kesempatan terpisah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengalokasikan anggaran minimal Rp5 triliun per tahun untuk pembangunan GSW.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan alokasi anggaran itu disiapkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta dapat mencapai Rp100 triliun.

"APBD Jakarta sekarang ini 91 triliun,



**“** Itu memang bisa disimpulkan bahwa yang paling *visible*, yang paling realistis adalah jika kita menerapkan pendekatan yang integratif.

mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas 100 [triliun]. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus *spend* kurang lebih Rp 5 triliun untuk *Sea Wall*," ujar Pramono.

Gubernur menyatakan pendanaan proyek GSW menjadi tantangan tersendiri. Namun, dia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap bekerja keras untuk merealisasikan proyek yang merupakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sebagian dana untuk proyek ini disebut akan diambil dari pengelolaan sampah.

"Dan saya yakin pasti di internal balai kota akan bisa untuk memenuhi itu. Dari mana? Dananya sebagian dari sampah, sebagian dari tentunya yang konvensional dari pajak dan sebagainya," jelasnya.

Pramono menjelaskan bahwa Jakarta memiliki potensi pendapatan dari pengelolaan sampah. Dengan 55 juta ton sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, imbuhnya, Pemprov berencana membangun empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) untuk mengolah limbah tersebut.

"Itu [PLTS dari Bantar Gebang] kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt, maka Jakarta kebutuhan listriknya sepenuhnya akan bisa disuplai dari tempat itu," jelas Pramono.

Dengan konsep tersebut, Pramono meyakini persoalan sampah dan kebutuhan listrik dapat teratasi, sekaligus mengurangi pencemaran udara. Selain itu, Jakarta juga akan memperoleh pendapatan tambahan.

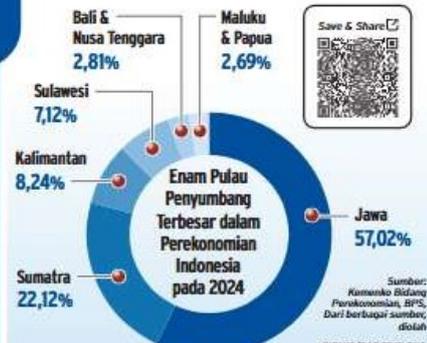
"Nah *revenue* inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun *Giant Sea Wall*," tuturnya. Pemprov DKI Jakarta membangun tanggul laut di kawasan Muara Angke untuk penanganan jangka menengah dalam mitigasi banjir rob.

Pembangunan tanggul itu adalah bagian dari dukungan Pemprov Jakarta terhadap proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang dicanangkan pemerintah pusat. ■

- Sejumlah negara berkomitmen mendanai proyek tanggul laut raksasa Pulau Jawa.
- Pemerintah siap membentuk badan otorita tanggul laut raksasa atau *giant sea wall*.

## Fakta-Fakta Pantai Utara Pulau Jawa

- Penyumbang sekitar 20,7% PDB Indonesia.
- Populasi lebih dari 50 juta jiwa.
- Terancam ambles dengan penurunan permukaan tanah 1 cm/tahun hingga 25 cm/tahun.
- Dihuni 70 Kawasan Industri.
- Terdapat lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Terdapat 28 Kawasan Peruntukan Industri.
- Lima Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.



**Perkiraan Biaya**  
Rp1.297 triliun

**Lama Proyek**  
10 tahun - 40 tahun

**Investor yang Berm minat**  
Korsel, Jepang, Belanda, China

**Profil Proyek Strategis Nasional Giant Sea Wall**